

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pentingnya laporan keuangan juga diungkapkan **Belkoui** dalam **Sari (2017)** bahwa laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan oleh manajer atas sumber daya pemilik. Salah satu parameter penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1*, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggung jawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut. Sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang yang salah satu bentuknya adalah *earnings management* atau manajemen laba.

Manajemen laba (*earnings management*) merupakan masalah agensi yang sering terjadi di lingkungan bisnis. Manajemen laba selalu diindentikan dengan perilaku *Opportunistic*, dimana dalam hal ini pihak manajemen bertindak untuk kepentingan pribadinya. Perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen

berawal dari konflik keagenan yaitu konflik kepentingan antara pemilik sebagai *principal* dan manajer sebagai agen. *Principal* berkepentingan memperoleh profitabilitas yang selalu meningkat sehingga dapat tercapai tingkat pengembalian saham yang maksimal. Agen berkepentingan memperoleh kompensasi kontrak yang maksimal agar tercapai kemakmurannya. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan, dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Hal ini akan mendorong agen untuk melakukan manajemen laba.

Terjadinya manajemen laba merupakan salah satu dampak dari pengawasan atau monitoring yang lemah sehingga memberi kesempatan kepada agen atau manajer untuk berperilaku menyimpang dengan melakukan manajemen laba. Praktik manajemen laba dapat diminimalkan dengan mekanisme *Corporate Governace* (pengawasan yang baik). Pengawasan terhadap manajemen atau direksi pada perusahaan merupakan tugas dari dewan komisaris. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dewan komisaris secara luas dipercaya memainkan peranan penting khususnya dalam memonitor manajemen tingkat atas **Gunarsih dan Hartadi (2015)**. Dewan komisaris bertugas untuk menjamin terlaksananya strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas FCGI.

Menurut **Fahmi (2013:279)** dalam **Wati (2016)** manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan. Tindakan ini sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud yang terkandung didalamnya. Menurut **Hery (2014:50)** dalam **Wati (2016)** menyatakan bahwa manajemen laba dikenal karena dampak negatifnya dan akuntan adalah pihak yang paling berperan untuk mengatasi praktik ini di dalam dunia bisnis. Fenomena manajemen laba sering terjadi dan menimbulkan masalah serta kerugian yang besar bagi berbagai pihak. Tindakan manajemen laba biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan baik untuk menghindari pajak yang besar maupun untuk menutupi kerugian yang perusahaan alami dengan tujuan agar para investor tetap menanam saham pada perusahaan mereka.

Tindakan *earnings management* yang dilakukan manajemen telah memicu timbulnya skandal dalam laporan keuangan. Fenomena yang terjadi pada PT. Ades Alfindo di Indonesia. Kasus ini terungkap ketika manajemen baru PT. Ades menemukan inkonsistensi pencatatan atas penjualan periode 2001-2004. Sebelumnya pada Juni 2004 terjadi perubahan manajemen di PT. Ades dengan masuknya Water Partners Bottling Co. (perusahaan patungan The Coca Cola Company dan Nestle SA) dengan kepemilikan saham sebesar 65,07%. Pemilik baru inilah yang berhasil menemukan adanya inkonsistensi pencatatan dalam laporan keuangan periode 2001-2004 yang dilakukan oleh manajemen lama. Inkonsistensi pencatatan terjadi antara 2001 dan kuartal kedua 2004. Hasil penelusuran menunjukkan, untuk setiap kuartal, angka penjualan lebih tinggi antara 0,6-3,9 juta galon dibandingkan angka produksi.

Hal ini tentu tidak logis karena tidak mungkin orang menjual lebih banyak dari yang diproduksi. Manajemen Ades baru melaporkan angka penjualan riil pada 2001 diperkirakan lebih rendah Rp. 13 miliar dari yang dilaporkan. Pada 2002, perbedaannya mencapai Rp. 45 miliar, sedangkan untuk 2003 sebesar Rp. 55 miliar. Untuk enam bulan pertama 2004, selisihnya kira-kira hampir Rp. 2 miliar. Kesalahan tersebut luput dari pengamatan publik karena PT. Ades tidak memasukkan volume penjualan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Akibatnya, laporan keuangan yang disajikan PT. Ades pada 2001 dan 2004 lebih tinggi dari yang seharusnya dilaporkan.

Sedangkan fenomena yang terjadi pada PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) diduga manajemen melakukan manipulasi data kartu kredit. Hal ini diungkap oleh CNBC Indonesia dari para pihak yang mengetahui masalah ini, modifikasi data kartu kredit di Bukopin telah dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Jumlah kartu kredit yang dimodifikasi juga cukup besar, lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Sehingga PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) merevisi laporan keuangan tiga tahun terakhir, yaitu 2015, 2016, dan 2017. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mulai melakukan pemeriksaan. Manajemen Bukopin pun secara terang-terangan merevisi laporan keuangan dari 2015, 2016, dan 2017. Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar dari sebelumnya Rp 1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar.

Sebelum Otoritas melakukan klarifikasi, sebenarnya Bukopin telah dihukum atas insiden ini. Bukopin telah merevisi turun ekuitas yang dimiliki sebesar Rp 2,62 triliun pada akhir 2016, dari Rp 9,53 triliun menjadi Rp 6,91 triliun. Penurunan itu karena revisi turun saldo laba Rp 2,62 triliun menjadi Rp 5,52 triliun karena laba yang dilaporkan sebelumnya tidak benar.

Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan FCGI dalam **Imani (2016)** karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba. beberapa karakteristik dewan komisaris yang dapat mempengaruhi manajemen laba yaitu independensi dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris. Menurut **Zehnder (2000)** dalam **Daeli (2018)** dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance*, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Menurut **Hanif (2014)** dalam **Putri (2018)** dewan komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direktur. Tanggung jawab dewan komisaris adalah memonitor kinerja manajerial dan mencapai tingkat timbal balik (*return*) yang memadai bagi pemegang saham.

Menurut **Nadapdap (2016:127)** komisaris independen adalah komisaris yang tidak ada hubungan dengan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham. Komisaris independen dapat juga dipahami sebagai

komisaris yang bukan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat ataupun seorang yang berhubungan secara langsung dengan ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Menurut **Sartori (2008)** dalam **Miftahussaadah (2018)** para komisaris independen dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dalam menyusun strategi manajemen pajak perusahaan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berguna sehingga lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak. Komisaris independen menurut OJK Nomor 30/POJK.05/2014 adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota direksi, dewan komisaris lainnya dan anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut **Riniati (2015)** komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi akuntansi. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. Menurut **Wicaksono dan Miftah (2016)** Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Menurut

**Yunianto (2013)** menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar akan menurunkan manajemen laba.

Menurut **Meiranto (2013)** dalam **Putri (2018)** ukuran dewan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. **Jansen (1993)** dalam **Putri (2018)** menyatakan bahwa ketika dewan lebih dari tujuh atau delapan anggota, itu kurang efektif karena masalah koordinasi dan proses yang pada gilirannya memperlemah pengawasan. **Rahardja (2014)** menyatakan ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan pemantauan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut **Imani (2016)** menunjukkan Komposisi Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan Independensi Dewan Komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Menurut **Harsari (2016)** menemukan bahwa karakteristik dewan komisaris yang terdiri dari ukuran dewan komisaris berhubungan positif signifikan terhadap manajemen laba. Menurut **Prabowo (2014)** menemukan bahwa secara simultan variable komisaris independen, independensi komite audit, ukuran dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh **Suryani (2015)** menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Berapapun jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan tidak akan mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti termotivasi kembali meneliti dengan mengambil judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP *EARNINGS MANAGEMENT* DENGAN *LEVERAGE* SEBAGAI VARIABEL KONTROL (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN YANG TERGOLONG LQ45 YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Meminimalisir terjadinya praktik *earnings management*.
2. Perusahaan LQ45 berusaha memaksimalkan laba perusahaan (Profitabilitas).
3. Meningkatkan kemampuan manajerial yang lebih baik.
4. Perusahaan-Perusahaan yang terlibat berusaha untuk meminimalisir kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.
5. Dewan Komisaris mempengaruhi manajemen laba baik secara usia, jabatan, Independensi, ukuran dan komposisi.
6. Mekanisme *corporate governance* dilakukan namun proses manajemen laba tetap berjalan
7. Perilaku *Opportunistic* yang menaikkan nilai perusahaan melalui praktik manajemen laba
8. Terdapat manipulasi laporan keuangan oleh manajemen untuk menekan fluktuasi laba pada perusahaan melalui praktik perataan laba



9. Manajemen laba terjadi karena pengawasan atau monitoring yang lemah sehingga memberi kesempatan kepada agen melakukan manajemen laba
10. Adanya dewan komisaris dapat meminimalisir terjadinya praktik *earnings management* yang dilakukan agen dalam perusahaan

### **1.3. Batasan Masalah**

Dari identifikasi diatas maka penulis ingin membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap *Earnings Management* pada perusahaan tergolong LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan yang tergolong LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia?
2. Bagaimana komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan yang tergolong LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia?
3. Bagaimana ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan yang tergolong LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia?

4. Bagaimana independensi dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris terhadap *earnings management* pada perusahaan yang tergolong LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia?
5. Bagaimana independensi dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris dengan *Leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *earnings management* pada perusahaan yang tergolong LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap *earnings management* pada perusahaan yang tergolong LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap terhadap *earnings management* pada perusahaan yang tergolong LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi dewan komisaris terhadap terhadap *earnings management* pada perusahaan yang tergolong LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap terhadap *earnings management* pada perusahaan yang tergolong LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia

4. Untuk mengetahui pengaruh independensi dewan komisaris, komposisi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris terhadap *earnings management* pada perusahaan yang tergolong LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia?
5. Untuk mengetahui pengaruh independensi dewan komisaris, komposisi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris dengan *Leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *earnings management* pada perusahaan yang tergolong LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia?

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan berfikir dan menambah pengetahuan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan akan memberi masukan yang dapat dipertimbangkan untuk kelangsungan usanya dimasa yang akan datang
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya.